

KOORDINASI GURU PAI DAN PENGAWAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PADA SMP DI PAPUA BARAT



*Achmad Abubakar**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: achmaduinalauddin@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Kualitas, Sinergitas,
Guru PAI,
Pengawas*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: kebutuhan SMPN terhadap guru PAI dan pengawas; tingkat kualitas pembinaan dan kepengawasan terhadap tugas Guru PAI; serta tingkat sinergitas guru PAI dan pengawas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian mengambil sampel pada semua guru PAI dan Pengawas di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Ditemukan bahwa masih terdapat sejumlah 46% satuan pendidikan di Papua Barat yang memiliki guru PAI. Khusus di SMP terdapat sejumlah 23% satuan pendidikan yang belum memiliki guru PAI (23% di SMPN dan 25% di SMPS). Sementara untuk kebutuhan kepengawasan, Kementerian Agama Provinsi Papua Barat baru menyediakan sejumlah 20% pengawas dari jumlah yang dibutuhkan. Tingkat kualitas pembimbingan terhadap peningkatan kualitas tugas guru PAI terkategori sangat tinggi, tingkat kualitas kemampuan pengawas melaksanakan tugas kepengawasan terkategori tinggi, dan tingkat sinergitas guru PAI dan pengawas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran terkategori sangat tinggi.

ABSTRACT

Keywords:
*Quality, synergy,
PAI teacher,
supervisor*

This study aims to find out: the needs of SMPN for PAI teachers and supervisors; level of quality of coaching and supervision towards the duties of PAI Teachers; and the level of synergy between PAI teachers and supervisors in improving the quality of learning. The study took samples from all PAI and Supervisor teachers in Sorong City and Sorong Regency. It was found that there were still 46% of education units in West Papua that had PAI teachers. Especially in junior high schools there are 23% of education units that do not have PAI teachers (23% in SMPN and 25% in SMPS). As for supervision needs, Ministry of Religion West Papua provides 20% of supervisors of the amount needed. The level of quality of guidance on improving the quality of duty of categorized PAI teachers is very high, the level of quality ability of supervisors to carry supervisory duties categorized is high, and the level of synergy PAI teachers and supervisors in improving the quality of learning categorized is very high.

PENDAHULUAN

§alah satu agenda prioritas dalam “Nawa Cita” pemerintahan Jokowi/JK, 2014-2019 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya pembangunan pendidikan melalui pelaksanaan program “Indonesia Pintar”. Program ini dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kementerian Agama RI kemudian menindaklanjuti dengan menuangkannya ke dalam “rencana strategis” (renstra) Kementerian Agama RI tahun 2014-2019. Sasaran strategis dalam masa lima tahun ke depan terkait fungsi pendidikan ada 7 (tujuh), dua diantaranya adalah: *Pertama:* Sasaran terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. *Kedua:* Sasaran terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan adalah meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan professional pada pendidikan umum berciri khas agama, yang ditandai dengan: a) meningkatnya persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4; b) meningkatnya persentase dosen berkualifikasi minimal S2; c) meningkatnya persentase guru RA-Madrasah bersertifikat; dan d) meningkatnya persentase dosen bersertifikat.

Upaya mewujudkan kebijakan tersebut, Kementerian Agama secara terus menerus telah melakukan upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program peningkatan mutu pendidikan sebagai lembaga yang memberikan layanan pendidikan.

Keberadaan guru pendidikan agama merupakan komponen terpenting dari penyelenggara pendidikan agama di sekolah. Penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah juga masih menghadapi berbagai masalah, terkait dengan tenaga kependidikan ini, misalnya kekurangan guru pendidikan agama di sekolah, kurang meratanya guru pendidikan agama di sekolah, antara kota dan daerah, apalagi wilayah pedalaman. Begitupula belum seluruh lembaga pendidikan terutama swasta menyiapkan guru pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik yang dianut, sebagaimana juga yang ditulis oleh An-Nahidl, dkk. (2010:2-3).

Pada sisi lain, masalah yang masih membelenggu adalah persoalan profesionalisme guru. Banyak problem yang terkait dengan itu, termasuk keberadaan “pengawas” yang diharapkan bisa membantu mengatasinya, namun tampaknya juga masih stagnan. Padahal, peningkatan profesionalisme guru dapat diperoleh dari bimbingan, latihan dan masukan dari tenaga pengawas. Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat, serta mempunyai peran yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan lembaga pendidikan.

Keberadaan pengawas sangat diharapkan oleh guru dalam rangka membantu dan membimbing guru ke arah tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran guru mata pelajaran. Pengawasan dalam rangka mengetahui serta memperbaiki berbagai kelemahan yang selama ini dilakukan menuju pencapaian tujuan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

Adanya pengawas pada sekolah merujuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 381 Tahun 1999 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan pengawas pendidikan agama. Pengawas pada sekolah umum ada dua macam pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada TK, SD, SLB serta pengawas sekolah mata pelajaran agama Islam SLTP, SMU/K.

Berangkat dari pentingnya peran pengawas dan peran guru tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian terkait ketersediaan pengawas dan guru PAI mengingat peran penting keduanya bagi peningkatan mutu dan kualitas dunia pendidikan, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian terkait “kinerja Guru dan Pengawas”, khususnya sinergitas kerja keduanya, karena persoalan tersebut terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

Masalah penelitian: “Bagaimana Sinergitas Kinerja Guru dengan Pengawas dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Timur Indonesia”. Pertanyaan penelitian: 1) apakah ada keseimbangan proporsi antara guru dengan pengawas Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Timur Indonesia? 2) Apakah kinerja guru dan pengawas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing? 3) Apakah ada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guru dengan pengawas? 4) Apakah kinerja guru dengan pengawas sudah bersinergi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran?

Tujuan umum penelitian ingin menelusuri dan mengungkap sinergitas

kinerja guru dengan pengawas dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran pada beberapa Sekolah Menengah Pertama di Kawasan Timur Indonesia”. Dan Tujuan khusus penelitian adalah mengungkap ada tidaknya keseimbangan secara profesional antara guru dengan pengawas di beberapa Sekolah Menengah Pertama pada beberapa daerah Kawasan Timur Indonesia, mengungkap realitas kinerja guru dan pengawas tersebut dan memperhadapkan dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing; mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guru dengan pengawas; dan mengungkap ada tidaknya sinergitas kinerja guru dengan pengawas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kegunaan penelitian ini diharapkan secara umum akan sangat memungkinkan dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan bagi para pembuat kebijakan di Kementerian Agama, khususnya yang terkait dengan kinerja guru dan pengawas dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran; Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan terkait kinerja guru dan pengawas dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama; Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti dan dosen atau yang bergerak dalam ranah keilmuan untuk dijadikan sebagai bahan bacaan, bahan bandingan dan rujukan.

Tinjauan Pustaka

Beberapa lembaga penelitian dan perguruan tinggi, telah melakukan penelitian terkait keberadaan guru dan pengawas, demikian juga penyebarannya di beberapa sekolah sebagai tempat melaksanakan tugas. Penelitian yang dimaksud sebagai berikut: Hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tentang pemenuhan guru PAI di sekolah menemukan bahwa hampir seluruh SMP negeri dan swasta mengalami kekurangan guru Pendidikan

Agama Islam. Kekurangan tertinggi di Kota Makassar sebanyak 43 orang, Banjarmasin 24 orang, dan Kota Ambon 11 orang sementara untuk kota lainnya sekitar 1 sampai 6 orang untuk masing-masing SMP baik negeri maupun swasta. Di sisi lain di jumpai SMP yang mengalami kelebihan guru PAI (An-Nahidl, dkk, 2010:5).

Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan terkait kinerja pengawas PAI menemukan, bahwa kinerja pengawas PAI sudah cukup efektif dalam menjalankan fungsinya yang berimbang pada cukup baiknya kinerja yang diperlihatkan pengawas PAI terutama berkenaan dengan pembinaan kepada guru PAI tentang pelaksanaan PBM, evaluasi hasil pengawasan PAI, dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Namun kinerja pengawas PAI dalam penyusunan program pengawasan sekolah, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan analisis terhadap belajar siswa, kemampuan guru, sumber daya pendidik, dan pengembangan profesi menunjukkan hasil yang belum maksimal (An-Nahidl, 2010:105).

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar pada tahun 2012 melakukan penelitian tentang kompetensi pengawas yang menemukan bahwa secara umum tingkat kompetensi pengawas terkategori *sedang* pada semua lokasi di antaranya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur (Kumpulan Laporan Penelitian tahun 2012).

Penelitian berkaitan kinerja pengawas oleh Retoliah (2014:384) menyimpulkan bahwa kinerja pengawas PAI Kota Palu dalam penyusunan program pengawasan baik Prota, Prosem maupun RKA berhasil dengan baik. Kinerja pengawas PAI dalam pelaksanaan program kepengawasan hasilnya bervariasi. Selain itu beberapa pengawas tidak bekerja secara maksimal, karena adanya hambatan di lapangan yang penyebabnya antara lain karena adanya dualisme kepengawasan PAI.

Kinerja Pengawas PAI dalam penyusunan laporan berhasil baik terutama dalam penyusunan laporan bulanan sesuai dengan jumlah sekolah yang termasuk dalam binaan pengawas.

Penelitian terkait oleh Badruzzaman tentang hubungan performansi pengawas dan guru PAI dalam upaya meningkatkan mutu PAI pada satuan pendidikan di Kabupaten Konawe 2005 menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara performansi pengawas dan performansi guru PAI, hubungan tersebut sangat kuat (Badruzzaman, 2005:46).

Dari kajian di atas peneliti ingin melihat sinergitas kinerja antara guru dengan pengawas dalam kaitannya dengan peningkatan pembelajaran, karena bagaimanapun keberadaan guru dan pengawas selalu terkait dengan pekerjaan atau tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

Sinergitas Kinerja

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008:1459) kata sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Sinergis lebih kepada menyinergikan, menggiatkan: bersinergi untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan gabungan atau bekerja dan secara positif yang menguntungkan.

Pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Substansi pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan terutama guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran.

Menurut Sudarmanto, (2009: 8-9) menjelaskan tentang kinerja yaitu: (1) kinerja yang merujuk pengertian pada hasil, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas selama

periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil terkait dengan produktivitas dan efektivitas, (2) kinerja merujuk pengertian pada perilaku, kinerja merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi tempat orang bekerja. Kinerja ini sinonim dengan perilaku, yang berarti sesuatu secara aktual dapat dikerjakan dan diobservasi.

Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan seorang guru PAI dan pengawas PAI. Hal ini sebagaimana perilaku secara aktual yang telah dikerjakan oleh guru PAI dan pengawas PAI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sinergi kinerja antara guru PAI dan Pengawas PAI menjadi penting dalam menentukan pembelajaran yang akan dilakukan pada satuan pendidikan. Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu pembelajaran.

Guru Pendidikan Agama Islam

Berbagai pihak sepakat bahwa dunia pendidikan memegang peranan utama dalam menyiapkan dan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi tersebut. Salah satu isu yang banyak disoroti oleh berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan nasional adalah rendahnya pencapaian hasil pendidikan yang diperoleh peserta didik.

Melalui guru berlangsung proses transformasi nilai ilmu pengetahuan kepada peserta didik, sehingga pencapaian hasilnya amat ditentukan oleh kemampuan guru dan keterampilan guru dalam menjalankan tugasnya (Agung, Iskandar dan Yufriawati. 2013:153-154). Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut untuk mampu mengimbangi bahkan melampaui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam masyarakat (Kunandar, 2008:37).

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang guru dalam

BAB I Pasal 1 berbunyi bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dan pasal 2 Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Bagi guru PAI di samping memberikan mengajarkan mata pelajaran PAI juga memiliki tugas tambahan yakni membina kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan. Ketentuan tentang penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada sekolah umum diatur dalam Perdirjenpendis Kemenag No. Djl/12A/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada sekolah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 dinyatakan bahwa: Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bagi guru agama meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepemimpinan (KMA No 16 tahun 2010).

Menurut Fathurrohman (2015:112) kompetensi guru merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam diri seseorang guru untuk menunjang keberlangsungannya dalam menjalankan tugasnya. Sebagai guru memiliki beban kerja sebagai mana tertuang dalam Permen Diknas nomor 39 tahun 2009

pasal 1 bahwa beban guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Eksistensi Pengawas

Pengawas pendidikan dalam berbagai pandangan tertuju pada perbaikan kinerja mengajar guru yang semestinya dilaksanakan oleh pengawas pendidikan itu sendiri walaupun dalam perjalannya perbaikan sistem pembelajaran dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait yakni oleh guru itu sendiri, siswa, masyarakat, kepala sekolah, pengawas pendidikan serta instansi terkait (Aedi, 2014:viii-ix).

Pengawas memiliki tugas yang lebih berat, yaitu menjamin agar fungsi personil dan organisasi dipersekolahan berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi inilah yang akan menjamin terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran di setiap sekolah. Pengawas yang andal adalah yang memiliki kemampuan menjamin terlaksananya fungsi pokok personil dan organisasi.

Pengawas sebagai tenaga kependidikan yang bertujuan untuk mengefektifkan fungsi personil pendidikan, seharusnya diberdayakan melalui proses pemberdayaan yang sistematis. Pada saat yang bersamaan seharusnya pola perekrutan pengawas dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan, sehingga memiliki kinerja yang baik dan berimplikasi kepada peningkatan mutu pendidikan secara signifikan.

Lembaga pendidikan formal sekolah harus meningkatkan mutu pendidikannya demi terciptanya sekolah yang berkualitas. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan komponen pendidikan salah satunya adalah pengawas. Pengawas harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional demi kemajuan pendidikan sekolah.

Melaksanakan tugas sebagai pengawas maka kualifikasi yang harus

diinternalisasikan ke dalam diri seorang pengawas adalah kemampuan memberikan bantuan dan pengarahan kepada personil sekolah, yang meliputi kepala sekolah, guru dan komponen sekolah lainnya yang mengalami kesulitan. Bantuan yang diberikan adalah bantuan profesional agar seluruh personil sekolah dapat melaksanakan tugas masing-masing. Terkait beban kerja pengawas madrasah dan pengawas PAI yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 pasal 10, yaitu: 1) Beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah adalah ekuivalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu, termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di Sekolah. 2) Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI melaksanakan tugas pengawasan terhadap minimal 7 (tujuh) RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK. 3) Pengawas PAI pada Sekolah melaksanakan tugas pengawasan terhadap paling minimal 20 (dua puluh) Guru PAI pada TK, SD, SMP dan/atau SMA. 4) Penetapan satuan pendidikan sebagai binaan Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atas pertimbangan Ketua Pokjawas tingkat Kabupaten/Kota. 5) Dalam hal beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi karena tidak terdapat jumlah minimal satuan pendidikan atau Guru PAI pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat menetapkan beban kerja minimal Pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah di wilayahnya.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, tugas pokok pengawas sekolah ialah melaksanakan supervisi akademik dan supervisi manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi

penyusunan program pengawasan, pemantauan pelaksanaan delapan standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Kualitas Pembelajaran

Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia oleh pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Standar tersebut merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan nasional. Lingkup standar tersebut meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Fungsi dari standar tersebut adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan tentunya didasarkan pada standar proses pembelajaran. Standar proses sebagaimana dijelaskan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 19-24 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan kegiatan pendidikan.

Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mengungkap kondisi riil dan proporsi guru PAI dengan pengawas pada masing-masing lokasi penelitian. Kinerja guru PAI akan ditelusuri demikian juga dengan kinerja pengawas yang didasari dengan tugas dan fungsi yang diperankan oleh guru dan pengawas tersebut.

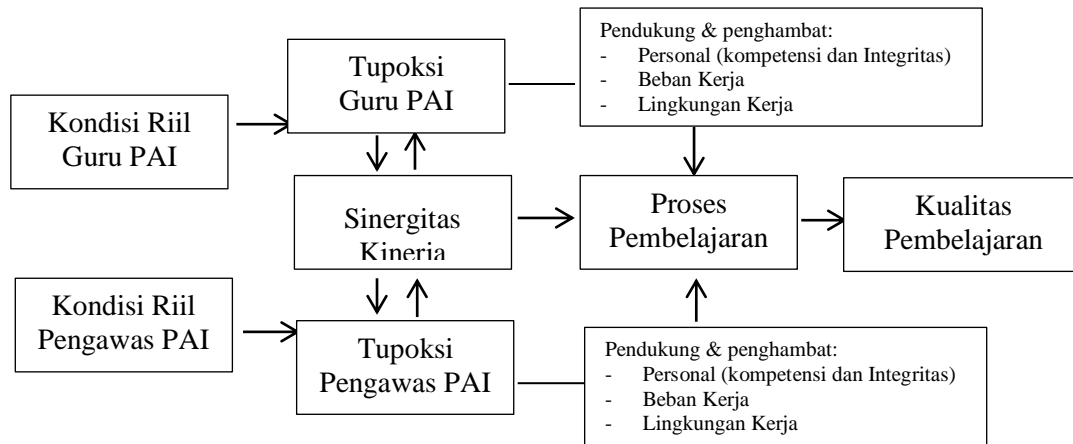
Sinergitas kinerja keduanya dalam menjalankan tugas dan fungsi pada satuan pendidikan menjadi penting dalam memajukan satuan pendidikan terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ditandai dengan adanya proses pendidikan yang berjalan

dengan manajemen yang baik oleh guru dan tentunya di bawah bimbingan seorang pengawas.

Guru dan pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya faktor pendukung dan penghambat menjadi penting untuk diketahui sebagai upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam

peran guru dan pengawas. Pendukung dan penghambat tugas dan fungsi guru dan pengawas dapat ditelusuri dengan melihat beberapa aspek, diantaranya: 1). Personal (kompetensi dan integritas), 2). Beban kerja, dan 3) lingkungan kerja. Uraian di atas di gambaran dalam bagan 1 sebagai berikut:

Bagan 1 Kerangka Pikir



Batasan Konsep

Sinergitas kinerja yang dimaksud adalah merupakan hasil dari pekerjaan tertentu atau aktivitas selama periode waktu tertentu yang relevan dengan tujuan organisasi dapat dikerjakan dan diobservasi (Sudarmanto. 2009). Karakteristik kinerja tersebut berkaitan dengan cara kerja, sikap atau kebebasan terhadap kerja, dan pandangan terhadap kerja dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan (Muhaimin dalam Fathurrohman, 2015:150-151) oleh guru PAI dan pengawas.

Guru PAI yang dimaksud adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan sesuai PP No 74 tahun 2008 tentang guru BAB I Pasal 1.

Pengawas (supervisor) yang dimaksud adalah tenaga kependidikan yang bertugas memberikan pengawasan kepada tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah, personil lainnya di sekolah). Supervisi

merupakan suatu usaha menstimuli, mengkoordinasikan dan membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru-guru sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif agar lebih mengerti, dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. (Boardman dalam Siahaan, dkk. 2006:14).

Kualitas Pembelajaran pada satuan pendidikan didasarkan pada standar proses pembelajaran. Standar proses sebagaimana dijelaskan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 19-24 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan kegiatan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Penelitian ini dikelola secara kuantitatif dengan pendekatan survei. Penelitian ini menggunakan angket untuk menjaring data yang berkaitan kinerja pengawas dan guru PAI dan mensinkronkannya untuk menemukan sinergitas kinerja keduanya. Data sinergitas

yang diperoleh nantinya dipergunakan untuk menggambarkan karakteristik sinergitas kinerja populasi (guru PAI dan pengawas).

Sasaran dalam penelitian ini adalah guru PAI sebanyak 26 orang dan pengawas pada satuan pendidikan SMP sebanyak 6 orang. Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) jenis data yang akan ditelusuri, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi: data yang terkait dengan kerja guru dan pengawas, sinergitas kinerja keduanya (guru dengan pengawas), tentang realitas kualitas pembelajaran di sekolah yang ditempati bertugas guru dan pengawas; diperoleh melalui guru dan pengawas. Sedang data sekunder terkait dengan data pendukung dari data primer yaitu dokumen-dokumen berkaitan pendidikan agama, pengawas dan guru PAI dan sebagainya, serta wawancara dengan Kepala Kemenag Provinsi/Kabupaten, Mapenda, Kasi PAIS, Kepala Sekolah, Pokjawas, dan MGMP PAI yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer sehingga kedua sumber data tersebut saling melengkapi dan memperkuat analisis.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, di antaranya: 1) Wawancara, pada saat wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, peneliti akan menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan, kondisi riil dan proporsi guru PAI dengan pengawas, terkait kinerja serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing guru dan pengawas; dan sinergitas kinerja antara guru dengan pengawas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pada lokasi masing-masing penelitian. 2) Angket atau daftar isian. Angket ini diperuntukkan bagi guru PAI dan pengawas. 3) Dokumentasi, metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data terakhir tahun 2016 tentang pendidikan agama, data guru PAI dan pengawas pada masing-masing lokasi penelitian, baik berupa data foto, tulisan atau dokumen-dokumen penting terkait penelitian.

Pengolahan dan analisis data disesuaikan dengan jenis data dan tujuan penelitian. Data yang terkait dengan jumlah guru PAI dan pengawas akan dikategorisasi berdasarkan jenisnya, dan penyajiannya dalam bentuk tabel. Sedang data yang terkait dengan kinerja guru dan pengawas serta sinergitas keduanya akan diolah dan dianalisis sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Pengolahan dan analisis data ini menggunakan tahapan indentifikasi, klasifikasi, reduksi, sintesis, dan interpretasi.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Kebutuhan Guru PAI dan Pengawas

Dalam konteks Provinsi Papua Barat, jumlah siswa yang terdata oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama berjumlah 127.864. Jumlah tersebut tampaknya belum menggambarkan seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Ada beberapa kabupaten yang tampaknya belum terdata. Hal ini berimplikasi pada ketidakvalidan gambaran jumlah siswa di seluruh Provinsi Papua Barat.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat telah mencatatkan pada buku Papua Barat dalam Angka Tahun 2016 sejumlah 13 kabupaten/kota. Yaitu: Fakfak, Manokwari, Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kota Sorong, Manokwari Selatan, Maybrat, Pengunungan Arfak, Tambrau. Namun jumlah siswa yang telah didata oleh Kementerian Agama Provinsi Papua Barat hanya delapan kabupaten pertama.

Kekurangan data tersebut setidaknya menggambarkan kondisi siswa di setiap jenjang pendidikan, khususnya jumlah siswa penganut agama Islam. Dua tabel berikut menggambarkan kondisi siswa penganut Agama Islam, dan perbandingannya dengan jumlah seluruh siswa dan di setiap kabupaten/kota. Tampak bahwa jumlah siswa penganut Agama Islam mencapai 58% dari seluruh siswa. Jumlah siswa penganut Agama Islam yang tertinggi persentasinya adalah di Kabupaten Fakfak, yaitu mencapai 78%. Sementara terdapat tiga kabupaten yang jumlah siswa

penganut Agama Islam berada pada dibawah 50% dari jumlah siswa keseluruhan, yaitu Kabupaten Manokwari: 48%, Kabupaten Sorong Selatan: 46%, dan Kabupaten Teluk Wondama: 16%. Hal serupa diamati berdasarkan jenjang pendidikan. Pada tingkat TK, persentasi jumlah siswa penganut agama Islam mencapai 82%, SD: 63%, SMP: 53, dan SMA: 48%.

Data tersebut di atas menggambarkan kondisi pendidikan terhadap penganut agama Islam di Papua Barat. Penganut agama Islam tampak memiliki akses terhadap pendidikan formal lebih tinggi. Padahal jumlah penduduk usia belajar se Provinsi Papua Barat adalah 405.801 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia belajar yang terakses dalam program pendidikan formal hanya 32%. Anak usia sekolah yang terakses dalam pendidikan formal berdasarkan golongan usianya adalah pada tingkat SD, yaitu sebesar 76%. Sementara pada tingkat PAUD dan TK, 4%, SMP: 32% dan SMA: 33%. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS tampak dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Sekolah di Papua Barat mencapai 79,35. Usia 7-12 tahun mencapai: 92,64, 13-15 tahun: 87,58, dan 16-18 tahun: 57,84.

Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan akses terhadap pendidikan formal. Meskipun jumlah nominal anak usia belajar non muslim lebih banyak mengakses pendidikan formal namun presentasi mereka tergolong masih minim di banding dengan anak usia belajar penganut agama Islam. Untuk mengkaji penyebab kondisi ini, memerlukan riset tersendiri yang lebih fokus mengungkap penyebabnya, baik dari prespektif kebijakan, sosial, dan budaya.

Jumlah Guru PAI

Dalam konteks Provinsi Papua Barat, telah terdata sejumlah 467 orang guru PAI. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Guru PAI dominan bertugas pada satuan pendidikan tingkat SD,

yaitu sejumlah 54% guru PAI. Sementara pada tingkat SMP sejumlah 23%, SMA: 10%, SMK: 6%, TK, 6%, dan PAUD 2%.

Kebutuhan guru PAI di Provinsi Papua Barat sangat tinggi. Bila diasumsikan bahwa setiap satuan pendidikan membutuhkan guru PAI, maka provinsi tersebut masih membutuhkan guru PAI sejumlah 1.762 guru PAI. Jumlah kebutuhan tersebut diperoleh dari selisih antara jumlah satuan pendidikan dengan jumlah guru PAI. Berdasarkan data BPS Papua Barat tahun 2016, bahwa terdapat sejumlah 2.229 satuan pendidikan di Papua Barat, yang terdiri atas 224 TK, 998 SD, 184 SMP, 77 SMA, dan 26 SMK. Lebih detail dapat dijelaskan pada setiap tingkatan satuan pendidikan. Kebutuhan guru PAI pada tingkat SD sejumlah 748 orang, SMP sejumlah 76 orang, SMA: 31 orang. Sementara di SMK tampak guru PAI berjumlah sama dengan satuan pendidikannya.

Lebih lanjut dijelaskan tentang karakteristik guru PAI di Papua Barat. Berdasarkan penempatan guru PAI di setiap kabupaten tampak beragam. Keragaman tersebut tampak berdasarkan jumlah siswa penganut agama Islam di setiap kabupaten/kota. Guru PAI tampak terdistribusi lebih banyak di Kabupaten Fakfak. Kabupaten yang lain yang dominan penduduk penganut agama Islam adalah Manokwari, Kab. Sorong. Hal serupa pada jenis satuan pendidikan tempat mengajar. Sejumlah 72,4% guru PAI yang bertugas di satuan pendidikan negeri, 27,2% yang bertugas di satuan pendidikan swasta dan 0,4% di SLB.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengangkatan guru adalah kualifikasi. Seperti yang dijelaskan terdahulu bahwa guru merupakan salah satu jabatan profesional, karenanya dalam pengangkatannya harus mempertimbangkan tingkat kualifikasi. Dan kualifikasi itu diukur pada tingkat pendidikan dan kesesuaian disiplin ilmu dan mata pelajaran yang diampuh. Berdasarkan data EMIS Provinsi Papua Barat, bahwa semua guru

PAI berasal dari kualifikasi disiplin ilmu Pendidikan Agama Islam. Sementara tingkat pendidikan guru PAI tampak beragam. Saat ini, sudah terdapat guru PAI yang berpendidikan terakhir S.2, yaitu sejumlah 2,4%. Namun dominan guru PAI berpendidikan terakhir S1 (82,4%). Selebihnya adalah D3: 0,4%, D2: 9.2%, D1: 0,4%. Bahkan masih terdapat guru PAI yang berpendidikan terakhir SMA: 5,4%.

Demikian halnya dengan status kepegawaian guru PAI, terdapat sejumlah 40% guru yang masih berstatus honorer. Status tersebut sangat mempengaruhi terhadap tingkat kesejahteraannya. Karena mereka hanya digaji berdasarkan jumlah jam mengajar. Tampaknya sistem pengupahan terhadap guru PAI tidak menerapkan sistem honorarium tenaga honor seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan 2016. Dalam pertaturan itu dicantumkan honorarium tenaga honorer berdasarkan provinsi, dan Provinsi Papua Barat sejumlah Rp. 2.530.000,-

Meskipun dalam regulasi tersebut tercantum honorarium Satpam dan Pengemudi, namun penghonoran guru sepatutnya juga menerapkan sistem yang sama. Sebab guru merupakan salah satu komponen aparatur yang sangat strategi dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mereka bersentuhan langsung dengan siswa-siswa yang akan memperjuangkan dan melanjutkan pembangunan bangsa di masa akan datang.

Kebutuhan Guru PAI di Papua Barat

Dalam konteks penelitian ini, jumlah guru PAI di Provinsi seperti yang telah dijelaskan pada uraian terdahulu adalah 465 orang. Jumlah tersebut tampaknya tidak memenuhi jumlah satuan pendidikan di Papua Barat. Masih terdapat satuan pendidikan yang belum tersuplai guru agama.

Seperti ketentuan yang diuraikan pada petunjuk perhitungan kebutuhan guru yang telah dijelaskan terdahulu maka

dapat dianalisis kebutuhan guru PAI pada setiap tingkatan baik di negeri maupun swasta.

Berdasarkan ketentuan terdahulu, bahwa ada dua cara yang berbeda untuk menentukan tingkat kebutuhan satuan pendidikan terhadap guru agama, yaitu:

- Guru agama ditetapkan minimal satu orang pada setiap satuan pendidikan. Ketentuan ini diterapkan pada tingkat Sekolah Dasar.
- Guru agama ditetapkan minimal satu orang pada setiap tingkatan kelas pada satu satuan pendidikan. Ketentuan ini diterapkan pada tingkat SMP dan SMA/SKM.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas maka analisis kebutuhan guru agama di Provinsi Papua Barat dilakukan.

Kebutuhan guru PAI pada Satuan Pendidikan SD

Menentukan jumlah ideal guru PAI di satuan pendidikan di Papua Barat dengan berdasar pada ketentuan yang diuraikan pada Petunjuk Teknis Perhitungan Kebutuhan Guru mudah. Jumlah ideal guru PAI ditentukan berdasarkan jumlah satuan pendidikan. Karenanya data tentang jumlah satuan pendidikan dasar menjadi rujukan untuk menentukan jumlah ideal guru PAI.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Diknas Provinsi Papua Barat, Satuan pendidikan umum di Provinsi Papua Barat pun membutuhkan guru PAI. Asumsi perhitungan jumlah kelas, jumlah jam belajar dan jumlah maksimal jam mengajar (24 jam) yang dipergunakan untuk menghitung jumlah Guru PAI yang dibutuhkan di Provinsi Papua Barat. Hasil perhitungan tersebut dijadikan dasar untuk menetapkan jumlah guru PAI yang dibutuhkan di setiap sekolah, yaitu sejumlah 3 orang guru PAI setiap sekolah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Papua Barat, ada sejumlah 317 sekolah (negeri dan swasta). Berdasarkan jumlah sekolah tersebut

ditentukan jumlah ideal guru PAI yaitu 951 orang. Sementara jumlah ideal guru PAI yang dibutuhkan oleh SMP negeri adalah 624 orang. Jumlah tersebut dapat dilihat distribusinya di setiap kabupaten/kota seperti pada tabel berikut:

Berdasarkan tabel yang sama, jumlah guru PAI yang tersedia saat ini adalah 71 orang. Distribusi di setiap kabupaten menampakan bahwa tak satupun kabupaten/kota yang telah terpenuhi kebutuhan jumlah guru PAI. Terdapat sejumlah 137 sekolah yang belum memiliki guru PAI. Lebih detail dapat diamati bahwa Fakfak tampaknya terdapat satu sekolah yang memiliki lebih dari satu guru PAI. Hal

serupa dengan kondisi di SMP Negeri di Kabupaten Sorong, semua SMP Negeri di Kabupaten Sorong telah memiliki guru PAI.

Meskipun demikian, jumlah ideal Guru PAI di Provinsi Papua Barat masih jauh dari yang diharapkan. Jumlah ideal guru PAI adalah 624 orang, sementara jumlah guru yang tersedia saat ini adalah 71 orang. Karenanya Provinsi Papua Barat masih membutuhkan guru PAI sejumlah 553 orang. Distribusi kebutuhan tersebut di setiap kabupaten/kota dapat diamati pada tabel berikut.

Jumlah Guru PAI yang dibutuhkan oleh Papua Barat

No	Kabupaten/Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA		
		N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml
1	Kab. Fak-Fak	-2	38	36	21	23	44	4	10	14
2	Kab. Kaimana	54	33	87	39	15	54	6	9	15
3	Kab. T. Wondama	32	18	50	30	6	36	6	0	6
4	Kab. Teluk Bintuni	26	36	62	74	10	84	25	18	43
5	Kab. Manokwari	44	30	74	65	31	94	10	33	43
6	Kab. Sorong	26	37	63	34	21	55	4	0	4
7	Kab. Sorong Selatan	71	48	119	85	73	158	32	40	72
8	Kab. Raja Ampat	55	41	96	79	15	94	32	4	36
9	Kab. Tambrauw	26	27	53	33	9	42	12	3	15
10	Kab. Maybrat	16	43	59	30	6	36	9	0	9
11	Kab. Peg. Arfak	43	14	57	30	3	33	18	0	18
12	Kab. Manokwari Sel	29	7	36	15	9	24	12	3	15
13	Kota Sorong	1	29	30	20	75	95	3	50	53
Jumlah		421	401	822	553	269	849	173	170	343

Proporsi Guru PAI dan Pengawas

Dalam konteks Papua Barat, jumlah pengawas PAI adalah 14 orang. Sejumlah tersebut terdistribusi ke 6 kabupaten/kota. Terdapat sejumlah masing 21% pengawas pada Kabupaten Fakfak, Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong. Namun berbeda di tiga kabupaten/kota yang tidak memiliki seorang pengawas. Kabupaten yang lain tampaknya belum memiliki pengawas.

Penempatan pengawas PAI tampaknya tidak terdistribusi dengan baik. Beban setiap

pengawas tampaknya tidak merata. Pengawas di Kabupaten Fakfak mendapat beban kerja mengawasi dan membina sejumlah 43 orang guru PAI setiap seorang pengawas. Sementara di Kabupaten Sorong seorang pengawas membina sejumlah 11 guru PAI. Bahkan beberapa kabupaten yang belum memiliki pengawas, padahal di kabupaten dimaksud sudah memiliki sejumlah tertentu guru PAI.

Jumlah Guru PAI dan Pengawas di Papua Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	
		Guru PAI	Pengawas
1	Kab. Fak-Fak	130	3
2	Kab. Kaimana	0	1
3	Kab. Teluk Wondama	6	0
4	Kab. Teluk Bintuni	43	0
5	Kab. Manokwari	85	3
6	Kab. Sorong	42	0
7	Kab. Sorong Selatan	34	3
8	Kab. Raja Ampat	37	1
9	Kab. Tambrauw	0	0
10	Kab. Maybrat	0	0
11	Kab. Peg. Arfak	0	0
12	Kab. Manokwari Sel	0	0
13	Kota Sorong	88	3
Jumlah		465	14

Proporsi Antara Guru dan Pengawas

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Guru PAI Setiap Pengawas
1	Kab. Fak-Fak	43 guru dibina oleh 1 pengawas
2	Kab. Kaimana	0 guru dibina oleh 1 pengawas
3	Kab. Teluk Wondama	0 guru dibina oleh 1 pengawas
4	Kab. Teluk Bintuni	0 guru dibina oleh 1 pengawas
5	Kab. Manokwari	28 guru dibina oleh 1 pengawas
6	Kab. Sorong	0 guru dibina oleh 1 pengawas
7	Kab. Sorong Selatan	11 guru dibina oleh 1 pengawas
8	Kab. Raja Ampat	37 guru dibina oleh 1 pengawas
9	Kab. Tambrauw	0
10	Kab. Maybrat	0
11	Kab. Peg. Arfak	29 guru dibina oleh 1 pengawas
12	Kab. Manokwari Sel	0
13	Kota Sorong	0
Jumlah		33 guru dibina oleh 1 pengawas

Kordinasi Pengawas dan Guru PAI dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Sinergitas pada Tugas Profesi Guru PAI.

Tampak bahwa tingkat sinergitas guru PAI dan Pengawas dalam meningkatkan kualitas yang berkaitan

dengan tugas Profesi Guru PAI terkategori sangat tinggi. Meskipun secara umum tingkat keterlibatan guru PAI dalam proses itu lebih tinggi dari pada tingkat keterlibatan pengawas.

Sinergitas pada tugas profesi

No	Aspek Sinergitas	Tingkat Keterlibatan		Tingkat Sinergitas
		Pengawas	Guru PAI	
1	Menguasai kompetensi, tujuan, pemilihan dan pengelolaan materi pelajaran.	100	90	90.00
2	Merefleksi hasil kinerja.	56	73	77.00
3	Mengembangkan kompetensi diri (Guru PAI).	100	96	96.00
4	Menginterpretasi dan menganalisis bidang keilmuan Pendidikan Agama Islam.	67	82	82.00

Tampak keterlibatan pengawas terkategori tertinggi pada dua aspek, yaitu upaya meningkatkan penguasaan guru PAI terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran PAI. Sementara dalam dua aspek yang lain tampak keterlibatan pengawas terkategori terendah, yaitu merefleksi hasil kinerja dan menginterpretasi dan menganalisis bidang keilmuan PAI. Sementara tingkat keterlibatan terendah guru PAI ada pada aspek merefleksi hasil kinerja.

Dari tingkat keterlibatan guru PAI dan pengawas dapat dilihat tingkat sinergitas kedua pada setiap aspek. Empat aspek yang diamati tampak mengindikasikan tingkat sinergitas yang tinggi. Namun pada aspek merefleksi hasil kinerja yang berkategori terendah.

Sinergitas pada Tugas Pedagogik Guru PAI

Tingkat sinergitas Guru PAI dan Pengawas dalam meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pedagogik terkategori sangat tinggi. Tingkat kualitas sinergitas tersebut didukung oleh tingkat keterlibatan yang sama oleh keduanya.

Sinergitas pada tugas pedagogik

No	Aspek Sinergitas	Tingkat Keterlibatan		Tingkat Sinergitas
		Pengawas	Guru PAI	
1	Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.	67	76	88.00
2	Mengembangkan kurikulum PAI.	67	80	84.00
3	Menyusun rancangan pembelajaran (RPP). Melaksanakan Pembelajaran.	77	74	96.00
4	Merencanakan dan melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.	83	61	73.00
5	Merefleksi dan memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran serta melakukan penelitian tindakan kelas.	80	83	98.00
6		81	83	98.00

Terdapat dua aspek dimana tingkat keterlibatan pengawas tampak terendah, yaitu pada aspek meningkatkan pemahaman guru PAI terhadap karakteristik peserta didik, dan pengembangan kurikulum PAI. Sementara guru PAI terkategori terendah tingkat keterlibatannya terhadap peningkatan pemahaman terhadap karakteristik peserta didik dan menyusun RPP.

Dari tingkat keterlibatan tersebut, tampak bahwa tingkat sinergitas guru PAI dan pengawas pada tugas-tugas pedagogik terkategori sangat tinggi. Tampak bahwa dari keenam aspek yang diamati, aspek melaksanakan pembelajaran yang memiliki tingkat sinergitas terendah.

Sinergitas pada tugas Kepemimpinan

Tingkat sinergitas guru PAI dan pengawas dalam meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinan guru PAI tampak terkategori tinggi. Tingkat keterlibatan guru PAI terhadap tugas kepemimpinan lebih tinggi dari pada tingkat keterlibatan pengawas.

Terdapat dua aspek dimana tingkat keterlibatan pengawas tampak terendah, yaitu pada aspek meningkatkan pemahaman guru PAI terhadap karakteristik peserta didik, dan pengembangan kurikulum PAI. Sementara guru PAI terkategori terendah tingkat keterlibatannya terhadap peningkatan pemahaman terhadap karakteristik peserta didik dan menyusun RPP.

Dari tingkat keterlibatan tersebut, tampak bahwa tingkat sinergitas guru PAI dan pengawas pada tugas-tugas pedagogik terkategori sangat tinggi. Tampak bahwa dari keenam aspek yang diamati, aspek melaksanakan pembelajaran yang memiliki tingkat sinergitas terendah.

Sinergitas pada tugas Kepemimpinan

Tingkat sinergitas guru PAI dan pengawas dalam meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas kepemimpinan guru PAI tampak terkategori tinggi. Tingkat keterlibatan guru PAI terhadap tugas kepemimpinan lebih tinggi dari pada tingkat keterlibatan pengawas.

Sinergitas dalam tugas kepemimpinan

No	Aspek Sinergitas	Tingkat Keterlibatan		Tingkat Sinergitas
		Pengawas	Guru PAI	
1	Membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama.	33	90	37.00

2	Mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah.	33	83	40.00
3	Memotivasi dan memfasilitasi, membimbing dan mengkonsultasikan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah.	67	71	94.00
4	Menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah.	67	85	79.00
5	Mengevaluasi program pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah.	67	85	79.00
6	Menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.	67	88	76.00

Dari keenam aspek yang diamati dalam bagian ini, terdapat sejumlah dua aspek yang tingkat ketelibatan pengawas terkategori rendah, yaitu terlibat dalam merencanakan pembudayaan pengamalan ajaran agama Islam dan mengorganisasikan potensi unsur sekolah untuk membudayakan pengamalan ajaran agama Islam. Sementara tingkat partisipasi guru PAI terendah pada aspek Memotivasi dan memfasilitasi, membimbing dan mengkonsultasikan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah.

Dari tingkat keterlibatan tersebut di atas tampak bahwa tingkat sinergitas guru

PAI dan pengawas dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas kepemimpinan terkategori tinggi. Dari keenam aspek yang diamati tampak bahwa dua aspek pertama yang terkategori terendah.

Sinergitas pada tugas Supervisi Akademik

Tingkat sinergitas guru PAI dan Pengawas dalam meningkatkan pelaksanaan tugas supervisi akademik terkategori sangat tinggi. Hal ini tampak pada tingkat keterlibatan guru PAI dan pengawas pada dua aspek yang diamati.

Sinergitas pada kegiatan supervise akademik

No	Aspek Sinergitas	Tingkat Keterlibatan		Tingkat Sinergitas
		Pengawas	Guru PAI	
1	Menyusun perangkat/program pembelajaran.	67	80	84.00
2	Pelaksanaan pembelajaran.	83	78	94.00

Tampak bahwa keterlibatan guru PAI lebih tinggi pada aspek penyusunan perangkat/program pembelajaran, sementara pengawas lebih tinggi tingkat keterlibatannya pada aspek pelaksanaan pembelajaran.

Sinergitas pada tugas Evaluasi Pembelajaran

Tingkat sinergitas guru PAI dan Pengawas dalam meningkatkan pelaksanaan tugas evaluasi pembelajaran terkategori tinggi. Hal ini tampak pada tingkat keterlibatan guru PAI dan pengawas pada tiga aspek yang diamati.

Sinergitas dalam kegiatan evaluasi pembelajaran

No	Aspek Sinergitas	Tingkat Keterlibatan		Tingkat Sinergitas
		Pengawas	Guru PAI	
1	Menyusun dan melakukan evaluasi proses pembelajaran.	67	79	85.00
2	Menyusun dan melakukan evaluasi kerja.	67	88	76.00
3	Menyusun dan melakukan evaluasi hasil pembelajaran.	33	75	44.00

Tampak bahwa tingkat keterlibatan guru PAI pada ketiga aspek yang diamati lebih tinggi dari pada tingkat keterlibatan pengawas. Namun tingkat keterlibatan terendah pengawas dan guru PAI pada aspek ketiga, yaitu menyusun dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Sinergitas pada tugas Penelitian dan Pengembangan

Tampak bahwa tingkat sinergitas guru PAI dan pengawas untuk meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan terkategori sangat rendah. Hal ini dapat diamati pada tiga aspek yang diamati.

Sinergitas dalam kegiatan penelitian dan pengembangan

No	Aspek Sinergitas	Tingkat Keterlibatan		Tingkat Sinergitas
		Pengawas	Guru PAI	
1	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian.	2	46	4.00
2	Menyusun karya tulis ilmiah.	0	33	0
3	Melakukan penelitian tindakan kelas dan penelitian tindakan kelas.	6	51	12.00

Tampak bahwa tingkat keterlibatan guru PAI dan Pengawas pada ketiga aspek yang diamati terkategori sangat rendah. Namun tingkat keterlibatan guru PAI pada ketiga aspek itu lebih tinggi dari pada tingkat keterlibatan pengawas. Tingkat keterlibatan tersebut mengakibatkan tingkat sinergitas sangat rendah.

PENUTUP

Terdapat sejumlah 46% satuan pendidikan di Papua Barat yang memiliki guru PAI. Khusus di SMP terdapat sejumlah 23% satuan pendidikan yang belum memiliki guru PAI (23% di SMPN dan 25% di SMPS). Sementara untuk kebutuhan kepengawasan, Kementerian Agama Provinsi Papua Barat baru menyediakan sejumlah 20% pengawas dari jumlah yang dibutuhkan.

Tingkat sinergitas guru PAI dan pengawas dalam meningkatkan proses pembelajaran tidak diikuti oleh tingkat

kualitas pembinaan dan pengawasan. Secara detail dijelaskan berikut.

Kualitas pembinaan dan pengawasan Guru PAI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP terkategori sedang. Enam aspek yang diamati dalam penelitian ini menampakkan bahwa tiga aspek yang terkategori tinggi tingkat pembinaannya yaitu pembinaan terhadap tugas profesi guru dan kepemimpinan guru PAI serta kegiatan evaluasi pendidikan. Dua aspek pembinaan yang terkategori sedang/cukup tinggi yaitu pembinaan terhadap tugas pedagogik guru PAI dan pelaksanaan supervisi akademik. Sedangkan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan terkategori rendah.

Tingkat sinergitas guru PAI dan pengawas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di SMP terkategori tinggi. Empat aspek sinergitas yang terkategori sangat tinggi yaitu sinergitas pada tugas profesional, pedagogik, supervisi akademik, dan evaluasi pendidikan. Sementara tingkat

sinergitas dalam tugas kepemimpinan tekategori sedang dan kelitbangan terkategori sangat rendah.

Beberapa hal yang mendukung proses peningkatan kualitas pembelajaran di SMP adalah dukungan manajerial, pembinaan, dan kerjasama. Dukungan manajerial berupa respons kebijakan Kementerian Diknas dan Kementerian Agama yang mendukung proses pembelajaran, pembimbingan dan pengawasan guru PAI, dan kerjasama antara semua komponen yang terlibat dalam proses peningkatan kualitas pembelajaran PAI. Selain itu terhadap pula kendala yang dirasakan, yaitu dukungan fasilitas dan pembiayaan dalam proses pembinaan guru PAI dan pembelajaran PAI. Dukungan fasilitas yang menjadi kendala adalah alat transportasi, kekurangan guru PAI, serta masalah kondisi geografis Papua Barat. Kendala yang lain dirasakan adalah distribusi buku paket PAI dan alat pembelajaran yang belum merata serta sarana ibadah.

Dalam upaya mempertahankan tingkat sinergitas antara guru PAI dan pengawas diperlukan kebijakan yang mempertemukan secara reguler antara guru dan pengawas untuk mendiskusikan aspek-aspek yang perlu disinergikan. Kebijakan yang dimaksud dapat berupa kegiatan rutin atau forum yang mendiskusikan perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi sinergitas antar guru dan pengawas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI.

Dalam upaya lebih meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan guru PAI, maka kebijakan peningkatan kemampuan pengawas melaksanakan tugas dan fungsinya urgen untuk diprogramkan segera. Kegiatan peningkatan yang dimaksud dapat berupa pemberian kesempatan kepada pengawas untuk meningkatkan kualifikasinya melalui program studi S2 dan S3. Demikian halnya dengan peningkatan kompetensi pengawas dengan programkan secara reguler keikutsertaan dalam diklat peningkatan

kompetensi pengawas. Dapat pula, Kementerian Agama Provinsi Papua Barat memprogramkan kegiatan serupa dengan mengundang para ahli atau widyaiswara untuk mendiklat secara khusus pengawas guru PAI di Papua Barat.

Respons positif dari Kementerian Diknas dan Kementerian Agama terhadap kegiatan kepengawasan Guru PAI perlu dimediasi agar koordinasi dan komunikasi kedua kementerian ini semakin intens. Pembentukan memorandum melakukan pertemuan secara reguler untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tingkat ketercapaian tujuan pendidikan agama perlu di inisiasi.

Mengantisipasi kekurangan buku paket PAI dan alat pembelajaran dibutuhkan kebijakan pendistribusian yang lebih merata.

Program Kementerian Agama untuk memfasilitasi sarana ibadah pada sekolah yang terkendala status kepemilikan sarana ibadah tersebut memerlukan kebijakan koordinatif antara Kementerian Agama dan Kementerian Diknas serta Pemerintah Daerah. Pembentukan tim untuk menginisiasi program ini perlu dibentuk agar lebih konsen dan fokus kegiatannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disadari bahwa penelitian ini terlaksana karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sorong beserta pengawas dan guru Pendidikan Agama Islam yang telah membantu penulis selama kegiatan pengumpulan data penelitian di Kabupaten Sorong. Demikian pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Baduruzzaman, peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam proses penyelesaian penelitian ini. Serta terima kasih juga kepada tim Redaksi Jurnal Educandum yang bersedia memuat tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Nur. 2014. *Pengawas Pendidikan Tinjauan, Teori, dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agung, Iskandar dan Yufriawati. 2013. *Pengembangan Pola Kerja Harmonis dan Sinergi Antara Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas*. Jakarta: Bestari Buana Murni.
- An-Nahidl, Nunu Ahmad. 2010. *Pendidikan Agama di Indonesia, Gagasan dan Ralitas*. Jakarta. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan RI.
- Badruzzaman. 2005. *Hubungan Performansi Pengawas dan Guru PAI Dalam Upaya Meningkatkan Mutu PAI pada Satuan Pendidikan*. Laporan Penelitian. Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Fathurrohman, Muhammad & Hindama Ruhyani. 2015. *Sukses Menjadi Pengawas Sekolah Ideal*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ismail, Arifuddin. 2015. *Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal*. Makassar: Kreatif Lenggara.
- Kumpulan Laporan Penelitian. 2012. *Kompetensi Pengawas Pendidikan di Kawasan Indonesia Timur*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Kunandar, 2008. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lampiran Keputusan Menteri Agama RI No 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Agama Tahun 2015-2019.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag No. Djl/12A/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler PAI pada sekolah.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Retoliah. 2014. *Istiqra*. Jurnal penelitian Ilmiah. Volume 2 Nomor 2 Juni-Desember 2014
- Siahaan, Amiruddin, dkk. 2006. *Manajemen Pengawas Pendidikan*. Jakarta: Quantum Teaching (Ciputat Press Group).
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.